



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAMBI

Jalan Mayjen M. Y. Singadikane No. 45, Jambi 36122; TELEPON (0741) 668802; FAKSIMILI (0741) 668801; SUREL :
kanwil.jambi@gmail.com; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi

NOTA DINAS
NOMOR ND-805/WPB.06/2024

Yth. : Para Kepala Kantor Unit Vertikal Kementerian Keuangan Jambi
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Buletin SIPIN Volume II Tahun 2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJPb Provinsi Jambi menerbitkan Buletin "SIPIN" sebagai salah satu strategi komunikasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan layanan edukasi serta menyampaikan informasi aktual seputar perkembangan ekonomi makro, fiskal regional, realisasi APBN, kebijakan publik, peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi, serta tajuk menarik lainnya terkait perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi.
2. SIPIN merupakan akronim dari "Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi", buletin SIPIN Volume II Tahun 2024 kali ini menyajikan informasi fiskal regional APBN Tahun 2024 dan postur pelaksanaan APBN Tahun 2024.
3. Selanjutnya, kami memohon dukungan Saudara untuk dapat mengamplifikasi informasi dimaksud kepada stakeholders terkait. Besar harapan kami buletin ini dapat memberikan informasi dan edukasi terkait peran pemerintah dalam mendukung perekonomian, pemulihan ekonomi, dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di regional Jambi. Buletin SIPIN Volume II Tahun 2024 dapat diakses dalam versi digital melalui tautan <http://bit.ly/FlipbookDJPbJambi>.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Buletin SIPIN Volume II Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi berkomitmen untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan secara OKE (Optimis, Kolaboratif dan Excellent).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan sinerginya diucapkan terima kasih.



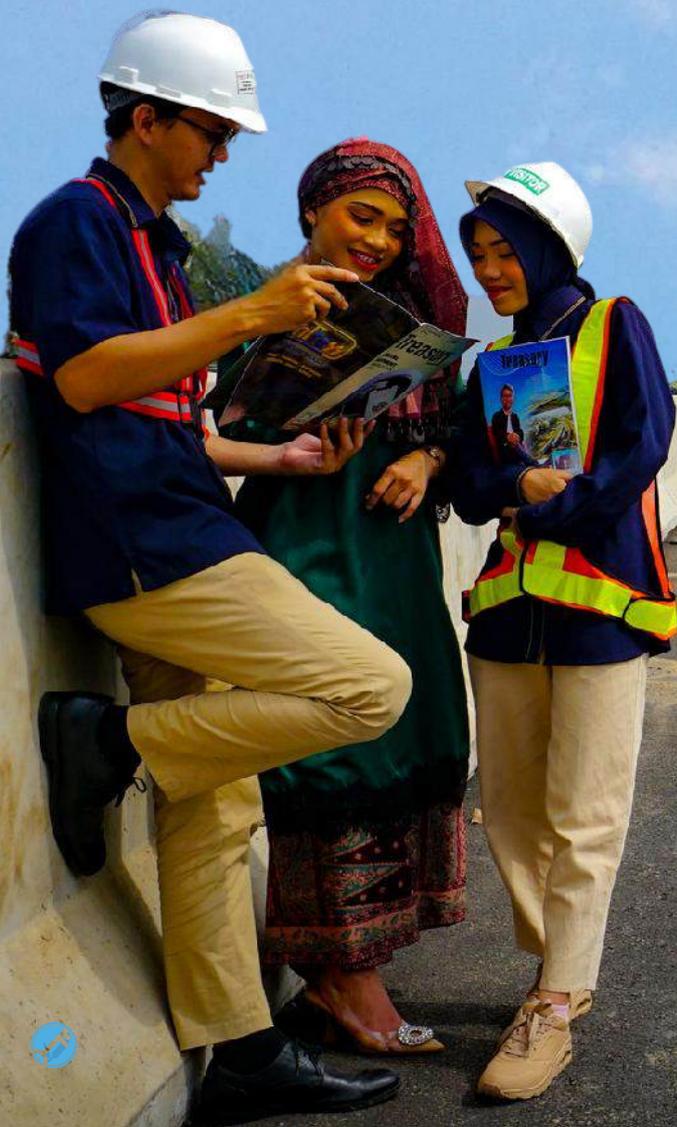
Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS





SIPIIN

SEPUTAR INFORMASI PERKEMBANGAN FISKAL & EKONOMI
VOLUME II 2024



SIPIN VOL.2

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buletin Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi (SIPIN) Vol. II Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Buletin ini disusun selain sebagai sarana informasi kinerja dan capaian APBN dan APBD dan publikasi implementasi *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* guna mendukung akselerasi pembangunan di Provinsi Jambi, juga sebagai bahan bacaan yang kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Kami harap, SIPIN dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Kami akan terus mengharapkan umpan balik yang membangun dari para pembaca sehingga buletin ini semakin sempurna.

"Naik sepeda ke arah Broni
Tujuan utama ke *Gentala Arasyi*
Selamat membaca buletin ini
Semoga bermanfaat dan
menginspirasi"

Selamat membaca buletin SIPIN ini
Semoga bermanfaat dan
menginspirasi

**BURHANI AS
KEPALA KANWIL DJPB
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR



D A F T A R I S I

02 Jambi Treasury Report

05 Regional Chief Economist

07 Tajuk Opini

11 Liputan

20 Zona Integritas

22 Profile/Tokoh

23 Klinik Akuntansi

25 Opini

27 Wisata



PASAR ANGSO DUO

Sekarang dikenal dengan nama Pasar Angso Duo baru sejak dilakukannya relokasi pada tahun 2018 dari pasar angso duo lama yang berlokasi tepat di pinggir Sungai Batanghari.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA REGIONAL JAMBI S.D JUNI 2024

PENDAPATAN REGIONAL

WILAYAH | JAMBI TAHUN | 2023

Pajak Dalam Negeri 3.454,35 M

PNBP 416,26 M

PENDAPATAN NEGARA 3.870,61 M



PENDAPATAN REGIONAL

WILAYAH | JAMBI TAHUN | 2024

Pajak Dalam Negeri 3.163,33 M

PNBP 443,18 M

PENDAPATAN NEGARA 3.870,61 M



Sumber: Laporan ALCO Regional Jambi s.d 30 Juni 2024

Pendapatan negara pada regional Jambi terus mengalami kontraksi sampai dengan akhir semester I tahun 2024. Penurunan yang signifikan pada penerimaan perpajakan Nonmigas menyebabkan kontraksi pendapatan sebesar 16,40% (yoy). Kontraksi lainnya dirasakan dari penerimaan bea keluar yang menurun sebesar 51,99% (yoy). Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan bea keluar didominasi oleh komoditi Cangkang Kelapa Sawit, RBD PKO, dan Komoditi Kayu Olahan yang terkontraksi akibat adanya penurunan harga refrensi CPO. Dibalik itu, penerimaan perpajakan PPN dan PPh Nonmigas masih memegang kontribusi terbesar dibandingkan sumber penerimaan perpajakan lainnya sebesar 45,05% dan 38,22% dari total pendapatan.

Penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan realisasi menjadi Rp443,18 M (tumbuh 6,47% yoy) yang berasal dari Penerimaan Kembali TKDD TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Modal dan Belanja Barang TAYL. Sama dengan triwulan sebelumnya, penerimaan PNBP Lainnya dan PNBP BLU tercatat memiliki realisasi terendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp26,74 M. Rendahnya capaian PNBP Lainnya diakibatkan penurunan pada Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya dan Pendapatan Biaya Pendidikan (Poltekkes sudah menjadi BLU). Capaian PNBP BLU bulan Juni sebesar Rp13,39 M ini didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp7,97 M (oleh satker RS Bratanata dan Rumkit Bhayangkara) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp3,80 M (oleh satker UIN STS Jambi, UNJA, dan Poltekkes Jambi). BLU telah mengesahkan pendapatan secara rutin tiap bulan.

BELANJA REGIONAL

WILAYAH | JAMBI TAHUN | 2023

BELANJA K/L

Belanja Pegawai 1.360,08 M

Belanja Barang 1.176,93 M

Belanja Modal 464,91 M

Belanja Bansos 11,44 M

REALISASI TKDD

Transfer Ke Daerah 5.592,02 M

Dana Desa 644,98 M

BELANJA NEGARA 9,24 T



17,52%

15,57%

160,54%

33,98%

11,67%

20,29%



BELANJA REGIONAL

WILAYAH | JAMBI TAHUN | 2024

BELANJA K/L

Belanja Pegawai 1.598,40 M

Belanja Barang 1.360,23 M

Belanja Modal 1.211,29 M

Belanja Bansos 15,32 M

REALISASI TKDD

Transfer Ke Daerah 6.244,66 M

Dana Desa 775,86 M

BELANJA NEGARA 11,20 T



Kinerja Belanja Negara s.d 30 Juni 2024 mencapai Rp11,20 T (46,53%), tumbuh 21,14% (yoy). Belanja negara ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat(K/L) sebesar Rp4,18 M dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp7,02 M. Kedua belanja ini mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada belanja K/L sebesar 38,89% (yoy). Dalam kurun waktu 5 tahun berakhir, capaian belanja pegawai terus mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan kenaikan pagu belanja pegawai.

Sumber: Laporan ALCO Regional Jambi s.d 30 Juni 2024



Di tahun 2024, pagu belanja 51 sebesar Rp2,81 T yang bertambah sebesar Rp135,86 M (5,17%) dibandingkan pagu tahun 2023. Penambahan ini ditujukan untuk mengakomodasi kenaikan gaji/tukin dan penambahan pegawai P3K di beberapa K/L seperti Kementerian Agama, Polri, dan Pertahanan. Meskipun begitu, potensi pagu minus di akhir tahun pada beberapa satker dapat menjadi perhatian untuk diselesaikan melalui revisi antar satker maupun revisi secara terpusat di DJA. Kinerja Realisasi belanja 51 mencapai Rp1.598,4 M (56,87%) yang didongkrak oleh penyaluran THR sebesar Rp173,26 M dan gaji ke-13 sebesar Rp151,05 M.

Berbeda dengan pagu belanja 51, pagu Belanja Barang memiliki tren menurun dari tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2023 dalam rangka pemilu/pilkada. Di tahun 2024, pagu belanja 52 menurun sebesar Rp98,17 M namun diperkirakan terjadi penambahan pagu pada beberapa kementerian yaitu KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu, pilkada dan dana hibah pada semester II, Kemendikbud Ristek (UNJA dan BPCB Jambi), dan Kementan (Dinas TPHP). Realisasi belanja 52 pada semester I 2024 menyentuh angka Rp1.360,23 M yang tumbuh 42,18% dari tahun 2023 untuk pembayaran petugas Badan Adhoc, pengawas Adhoc penyelenggara Pemilu, serta belanja barang non operasional untuk keperluan pemilu lainnya.



Pergerakan pagu belanja modal yang fluktuatif dalam waktu 5 tahun dengan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2022 s.d 2024. Sampai dengan bulan juni, pagu belanja modal 2024 sebesar Rp3.399,41 M yang dialokasikan untuk proyek pembangunan jalan tol bayung lencir-tempino oleh kemeterian PUPR. Peningkatan pagu belanja modal 2024 dibarengi dengan kenaikan besaran realisasi sehingga jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama, realisasi belanja modal s.d. Juni 2024 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp1.211,29 M. Realisasi belanja modal ini belum mencapai target serapan sampai dengan triwulan II, yaitu 40%. Oleh karenanya masih diperlukan akselerasi belanja terutama pada satker-satker Kemendikbud Ristek.

Pagu Belanja Bantuan Sosial dalam 5 tahun juga mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2024 pagu bansos sebesar Rp27,14 M meningkat sebesar Rp0,55 M dibandingkan tahun 2023. Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Jambi tahun 2024 disalurkan untuk program Bidik Misi dan KIP Kuliah di UIN STS Jambi dan IAIN Kerinci (Kemenag) serta Rehabilitasi oleh satker Sentra "Alyatama".

Penyebab fluktuasi tertinggi selama 2023 ialah penyaluran beasiswa KIP dan Bidik Misi di bulan Maret April dan Oktober November. Hal ini dipengaruhi oleh jadwal penyaluran pembaruan data siswa penerima beasiswa dan pergantian tahun ajaran. Diperkirakan hal yang sama akan terjadi di tahun 2024. Sampai dengan Juni 2024, realisasi bansos sudah mencapai 56,46% (Rp15,32 M). Capaian signifikan ini disumbang oleh Realisasi program Bidikmisi dan KIP Kuliah pada UIN STS Jambi dan IAIN Kerinci (Kemenag) serta realisasi belanja rehabilitasi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lansia. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan telah melebihi target capaian triwulan II, yaitu melebihi 50%.



UMKM BINAAN

KANWIL DJPB DAN KPPN PROVINSI JAMBI

AYU CATERING LESTARI



Sebagai pelaksanaan peran *financial advisor* di daerah, Kanwil DJPb dan KPPN Lingkup Provinsi Jambi melakukan pemberdayaan UMKM yang terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tahapan persiapan pemberdayaan UMKM dimulai dari profiling UMKM yang telah dilaksanakan oleh Kanwil dan seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Jambi.



UMKM Ayu Catering Lestari merupakan salah satu UMKM yang pernah dilaukan profiling UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi. UMKM ini bergerak pada bidang kuliner yang sudah beroperasi sejak bulan November 2006. Olahan makanan terdiri dair olahan makanan kering yaitu pastel kacang, rengginang, dan gabus keju dan olahan makanan basah yaitu tumpeng dan kue basah. Seluruh olahan ini dapat diperoleh di swalayan besar di Kota Jambi yaitu Trona, Meranti, dan Mendala. Selain itu, UMKM AC Lestari juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Produk UMKM ini juga sudah memiliki legalitas usaha berupa BPOM, sertifikat halal, NPWP, dan NIB. Sebagai UMKM yang siap mandiri, catering AC Lestari turut serta aktif mengembangkan usahanya dengan bergabung dalam Asosiasi Makanan dan Minuman (Asmami) Kota Jambi serta sering tergabung dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



Produk pastel kering AC Lestari berisikan kacang yang dijual dengan harga Rp10.000 per bungkus. Selain itu, olahan rengginang juga seharga Rp10.000/bungkus dan gabus keju seharga Rp15.000/bungkus. Produk olahan basah tumpeng dan kue basah dijual sesuai dengan pesanan pembeli untuk acara-acara tertentu. Proses pembuatan seluruh produk ini dilakukan oleh pemilik UMKM sendiri yakni Ibu Sri Lestari yang tentunya didampingi oleh pekerja beliau (keluarga dan tetangga). UMKM ini berlokasi di Komplek Pinang Merah, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk informasi pemesanan dapat melalui media ini:

CINTAI NEGERI MU,
BELI PRODUK UMKM!

CONTACT US



@ACPASTELKERING



0813-6773-0979



ACPASTELKERING@GMAIL.COM

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu yang juga menjadi komponen penting nya adalah belanja konektivitas untuk membangun dan memelihara infrastruktur transportasi. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan memperlancar mobilitas orang dan barang.

Jika dilihat dari kinerja realisasinya, belanja Infrastruktur Konektivitas Darat menjadi yang tertinggi dibandingkan belanja infrastruktur konektivitas lainnya dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Belanja paling tinggi terjadi di tahun 2023 dengan total realisasi anggaran dalam Bidang Konektivitas Darat sebesar Rp2.630,85 miliar.

ANALISIS PERKEMBANGAN BELANJA INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

Hal ini disebabkan oleh adanya rencana pembangunan Jan Tol Palembang-Jambi yang mulai dikerjakan pada tahun 2023. Setelah dilakukan analisis korelasi sederhana, belanja bidang konektivitas darat tersebut berpengaruh positif terhadap kemantapan panjang jalan nasional meskipun tidak signifikan. Indikator kemantapan jalan nasional tersebut merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas infrastruktur jalan di Indonesia.

Dampak positif dari belanja konektivitas ini tidak hanya meliputi peningkatan integrasi nasional, lebih dari itu, investasi infrastruktur konektivitas memberikan dampak multidimensi pada peningkatan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan begitu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil analisis regresi antara capaian konektivitas darat terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa capaian konektivitas darat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain capaian konektivitas darat, hasil analisis juga menunjukkan digitalisasi melalui konektivitas infrastruktur TIK juga berperan penting terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia suatu negara akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan bentuk-bentuk teknologi baru dan alat-alat produksi yang efisien dan efektif.

Oleh karena itu, Penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus memantau efektivitas belanja infrastruktur khususnya dalam hal konektivitas untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan kedepan dalam efektivitas pelaksanaan belanja pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan daerah, kualitas proyek, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.



PASAR OLAK KEMANG

Pasar tradisional ini berdiri di wilayah olak kemang, jambi seberang. Pada tahun 2017 dibangun Pasar Olak Kemang baru yang berlokasi di belakang pasar Olak Kemang lama



Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program pembiayaan murah jangka panjang kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa kemudahan mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Sejak tahun 2022, pengelolaan Program dan Dana KPR Sejahtera FLPP dialihkan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah, dana FLPP di BP Tapera dikelola menggunakan Tata Kelola investasi Pemerintah (Pasal 13). Pada Rapat Pimpinan Terbatas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023, Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan arahan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melaksanakan monitoring terhadap implementasi program KPR Sejahtera FLPP dalam rangka menjamin investasi pemerintah pada Program KPR Sejahtera FLPP berjalan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program telah berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan dampak positif bagi kelompok MBR yang merupakan sasaran dari program.



Sehubungan hal di atas, maka diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan dampak program KPR Sejahtera FLPP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta untuk melaksanakan beberapa mekanisme/tahapan pelaksanaan pemantauan di antaranya:

- Tahapan Perencanaan
- Tahapan Pengumpulan Data
- Tahapan Forum Group Discussion (FGD)
- Tahapan Analisis Data
- Tahapan Pelaporan

Saat ini dua tahapan dari seluruh tahapan di atas telah dilaksanakan yaitu tahapan Perencanaan dan Tahapan Pengumpulan Data.

Setelah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Bank Penyalur selesai melaksanakan tahapan pengumpulan data melalui Survei kepada MBR Penerima Program KPR Sejahtera FLPP dan Pengembang Rumah Subsidi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selanjutnya melaksanakan Focus Group Discussion dengan mengundang stakeholders terkait hunian dan permukiman seperti:

- Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Pengembang Perumahan Subsidi;
- Bank Penyalur Program FLPP.





Ketentuan KPR FLPP

- Suku Bunga 5% tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit
- Cicilan KPR maksimal 20 tahun
- Uang muka mulai dari 1%
- Bebas PPN

Syarat Penerima KPR FLPP

- Berkewarganegaraan Indonesia
- Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya
- Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri
- Tidak memiliki rumah
- Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020

Adapun manfaat yang diterima oleh pengembang melalui program FLPP diantaranya:

- Memberi banyak peluang bagi banyak pihak baik dari segi pemasaran, pegadaan, tempat tinggal yang layak, dan serapan tenaga kerja
- Penjualan lebih baik dan meningkat
- Pendapatan bertambah, penyaluran rumah lebih cepat, dan karyawan bertambah
- Suku bunga maksimal 5% memudahkan untuk penjualan rumah karena calon debitur tertarik dengan angsuran yang terjangkau oleh MBR
- Pengembangan usaha atau penambahan lokasi perumahan lebih cepat; menjadi mitra bank pelaksana KPR baik subsidi maupun non subsidi.

Hambatan yang dihadapi oleh pengembang sebagai berikut:

- Ketersediaan Modal
- Sulitnya mendapatkan land bank tanah yang sesuai untuk program FLPP, dan harga tanah naik meningkat secara drastis sehingga HPP untuk tanah FLPP tidak terjangkau untuk rumah FLPP
- Harga AJB dan BN serta pemecahan sertifikat beum disesuaikan dengan biaya-biaya yang diefisien atau dipangkas oleh program FLPP
- Biaya perizinan dan urusan BPN masih sama dengan pengurusan biaya non subsidi

Permasalahan yang dihadapi pengembang dengan adanya aturan non fix income yang belum bisa mendapatkan fasilitas MBR, adanya calon konsumen yang terjerat pinjol sehingga menjadi cacat, dan Subsidi Bunga Uang Muka (SBUM) tidak selalu diterima MBR setelah melaksanakan KPR subsidi.

Saran yang disampaikan oleh pengembang melalui hasil survey di antaranya:

- Agar untuk bank penyalur non fix income bisa di akomodir untuk memperoleh kredit perumahan FLPP
- Batas maksimal pendapatan konsumen double income dinaikan
- Dukungan KMK Bank terhadap pengembang, diusulkan rate bunga KMK untuk diturunkan sedikit dan jaminan KMK bagusnya cukup proyek itu sendiri, dan persyaratan/KPR lebih difleksibel (perhitungan income untuk single dari 6 juta menjadi 8 juta dan perhitungan join income suami istri dari 8 juta menjadi 10 juta)
- Sistem input data MBR (SIKASEP sering eror di angka 5, harus ulang lagi dan masa aktif sikasep 2 hari baru bisa diproses kembali, Pencairan SBUM baiknya 1 minggu dari pencairan KPR
- Banyaknya kejadian gagal di uji dini bahwa konsumen telah menerima bantuan FLPP pada hal tidak pernah menerima bantuan (hanya bantuan covid)
- Rumah subsidi yang telah KPR dan macet selanjutnya diambil alih bank dan pengembang diusulkan di KPR kan kembali dengan program FLPP dengan pembeli baru untuk membantu NPL bank - solusi perubahan warna site plan

Peran Pasar Sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia



Sumber : Siaran Pers Kementerian Perdagangan

Pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan interaksi permintaan dan penawaran hingga dapat menetapkan titik keseimbangan pasar. Di kota jambi sendiri telah terdaftar sekitar 31 pasar tradisional. Salah satu pasar yang terletak di pusat kota jambi adalah pasar angso duo yang memiliki luas wilayah sekitar 7,1 Hektar. Pasar ini memiliki 1096 kios, 156 ruko, 220 toko, dan 1430 los. Pasar Angso Duo ini mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana pasar ini merupakan sarana untuk menjual hasil produksi daerah, memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, melakukan transaksi jual beli sehingga dapat mendorong ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan memberikan dampak multidimensional terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mempertahankan eksistensinya, pasar angso duo perlu beradaptasi mengingat generasi muda saat ini lebih tertarik dengan gaya hidup modern. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah memberikan dukungan dengan mendorong program percepatan digitalisasi transaksi sejak tahun 2022. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Digitalisasi Pasar Rakyat dengan tujuan agar pasar-pasar rakyat memiliki lokapasar (marketplace) dan platform menuju era digital yang sudah masuk ke Indonesia. Digitalisasi pasar juga dinilai akan mempermudah pertemuan antara perdagangan dan pembeli serta memperpendek rantai distribusi selama ini.



Sumber : jambiprov.go.id



Sumber : Siaran Pers Kementerian Perdagangan

Kementerian keuangan juga terus melakukan pengawalan yang berfokus pada kebijakan pemberdayaan UMKM. Masing-masing unit eselon I memiliki program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan expertise masing-masing, antara lain pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan usaha mikro bagi (UMi) oleh Ditjen Perbendaharaan, pengembangan bisnis oleh Ditjen Pajak, klinik ekspor oleh Ditjen Bea Cukai, dan pemasaran melalui sistem lelang/auction oleh Ditjen Kekayaan Negara.

Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran dalam melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan untuk sarana dan prasarana yang ada demi kenyamanan pengunjung pasar. Peningkatan infrastruktur di pasar tradisional seperti akses wifi gratis juga penting untuk menarik pelanggan. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dapat juga memberikan sosialisasi pelatihan dan pendidikan tentang pemasaran digital untuk para pedagang sehingga dapat memanfaatkan media sosial dan strategi online untuk mempromosikan produk mereka. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran digital yang tepat, pasar tradisional ini tidak akan ketinggalan jaman meskipun di era digitalisasi yang berkembang pesat ini.



PASAR TALANG BANJAR

Sekarang dikenal dengan nama Pasar Angso Duo baru sejak dilakukannya relokasi pada tahun 2018 dari pasar angso duo lama yang berlokasi tepat di pinggir Sungai Batanghari.



Diskusi Fiskal Regional Capaian Indikator dan Strategi Peningkatan Daya Saing Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Jambi Tahun 2024

Pada Rabu 26 Juni 2024 bertempat di TVRI Jambi, Bapak Burhani AS menyampaikan bahwa belanja dukungan infrastruktur konektivitas memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jambi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan daya saing daerah, mendukung integrasi nasional, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Diseminasi Fiskal Regional

Statistik Policy Response Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

Dalam rangka menghadapi dampak perubahan iklim pada perekonomian, penting dilakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi regional yang terdampak oleh perubahan iklim serta dampak yang terjadi pada sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan FGD Diseminasi Fiskal Regional terkait Statistik Policy Response Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim pada Selasa, 25 Juni 2024.

Pada kegiatan ini, pemaparan materi dilakukan oleh: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi; Stasiun Meteorologi Sultan Thaha Jambi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; dan

Local Expert Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang berasal dari Universitas Jambi.



Sosialisasi Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Dalam Rangka Penguatan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Pada Kamis, 27 Juni 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan turut melibatkan KPPN lingkup Provinsi Jambi. Hal ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman lebih terkait Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sehingga baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat berperan sesuai dengan tugas masing-masing dalam mengimplementasikan harmonisasi ini. Pada kegiatan ini disampaikan 3 materi. Materi pertama yang disampaikan adalah Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional oleh Bapak Rian Kelana Ednur, Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Penyetaraan 3 DJPK. Materi kedua yang disampaikan adalah Sinergi Fiskal 7 Nasional Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif & Berkelanjutan oleh Bapak Kresnadi Prabowo Mukti, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV. Materi ketiga yang disampaikan adalah Harmonisasi Kebijakan Fiskal dari Sudut Pandang BPK oleh Bapak Paula Henry Simatupang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia khususnya Provinsi Jambi.

Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Keberlanjutan WBK

Pada tanggal 7 Juni 2024, berlokasi di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi, seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyatakan komitmen untuk mendukung keberlanjutan ZI WBK, komitmen untuk melakukan pencegahan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual dan komitmen untuk menjaga netralitas ASN.

Komitmen – komitmen tersebut dituangkan dalam piagam pernyataan yang ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi





Upacara Hari Lahir Pancasila

Memperingati hari lahir Pancasila tahun 2024, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Kanwil DJPb Provinsi pada tanggal 1 Juni 2024.

Upacara dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan unit kerja Kementerian Keuangan di Kota Jambi dengan inspektur upacara Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Jambi, Bapak Ahmar Rudi.



Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Pada Senin, 20 Mei 2024, kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku Kepala Perwakilan kemenkeu Jambi melaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pegawai dari seluruh Kantor Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Kota Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Burhani AS, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, menyampaikan dalam amanatnya bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyelenggaraan Qurban Idul Adha 1445 H

Pada Selasa, 18 Juni 2024, kanwil DJPb Jambi menyelenggarakan pemotongan hewan qurban dalam rangka merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai serta PPNPN Kanwil DJPb Jambi. Acara ini ditutup dengan pembagian daging qurban kepada masyarakat sekitar Kanwil DJPb Jambi.

Melalui Qurban, kita makin bersukur kepada Allah SWT atas nikmat kehidupan yang diberikan sekaligus mengasah kepedulian untuk berbagi dengan keluarga, teman, dan mereka yang membutuhkan.



Campus Goes To Treasury

Dalam rangka penyebaran informasi mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semakin strategis mendukung roda perekonomian regional, mengawal kebijakan fiskal di daerah, serta tugas lainnya yang berdampak kepada Masyarakat luas. Guna memudahkan penyampaian informasi tersebut sekaligus memeriahkan hari bakti Perbendaharaan ke-20 tahun 2024 sebagaimana amanat nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-124/PB.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-20 Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan edukasi dengan bentuk Campus Goes Treasury yang diselenggarakan secara luring di Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Adapun materi yang dibawakan narasumber yaitu Bapak Burhani AS Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku Dosen Praktisi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, mengangkat tema besar yaitu Desentralisasi Fiskal, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi DJPb lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi
- Pengertian Desentralisasi Fiskal
- Konsepsi Desentralisasi Fiskal
- Tantangan Desentralisasi Fiskal
- Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Transfer Keuangan Daerah
- Desain Transfer ke Daerah
- Kondisi Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi
- Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta paparan kelompok



Sosialisasi Mekanisme Perizinan Usaha dan Proses Sertifikasi Halal

Dalam era globalisasi dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, sertifikasi halal menjadi aspek krusial bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat bagi pemasaran produk di dalam negeri, tetapi juga menjadi kunci untuk menembus pasar internasional yang semakin luas. Berdasarkan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi melakukan Sosialisasi Mekanisme Proses Sertifikasi Halal dan Perizinan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM. Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Berikut rangkaian acara dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Proses Sertifikasi Halal dan Perizinan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM:

- KUR
- Digipay Satu
- Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Sertifikasi Halal
- Kisah Inspiratif dari Pelaku Usaha

In House Training

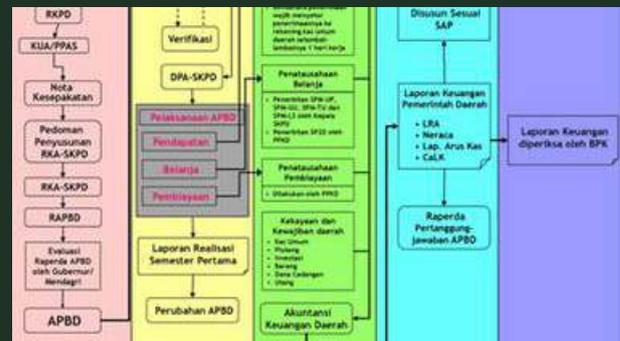


Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus dan terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kelayakan Investasi diukur dengan beberapa aspek sebagai berikut: 1) Aspek Teknis dan Produksi, 2) Aspek Manajemen dan SDM, 3) Aspek Produktivitas dan Efisiensi, 4) Aspek Hukum, 5) Aspek Sosial, 6) Aspek dampak Lingkungan, 7) Aspek Finansial, 8) Aspek Operasional, dan 9) Aspek Keamanan

Bedah APBD

Dalam rangka transformasi dan reformasi kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka saat ini peran DJPb tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan, namun juga dituntut untuk dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist, sekaligus Financial Advisor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Financial Advisor, terdapat beberapa tugas yang dilaksanakana yaitu Central Government Advisory, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory.

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah :



Struktur APBD :

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
PAD > Pajak Daerah > Retribusi Daerah > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan > Lain-lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer > Transfer Pemerintah Pusat > Transfer Antar Daerah LAIN 2 PD YG SAH > Hibah > Dana Darurat > Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUL	Belanja Operasi > B. Pegawai > B. Barang & Jasa > B. Bunga > B. Subsidi > B. Hibah > B. Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer > B. Bagi Hasil > B. Bantuan Keuangan	Penerimaan Pembiayaan > BILAKA > Pencairan d. cadangan > Penj yang dipisahkan > Penerimaan kembali pemberian pinjaman > Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUL Penerimaan Pembiayaan > penyertaan modal > Pembentukan dana cadangan > Pemberian pinjaman > pengalangan Pembiayaan lainnya sesuai PUL

Belanja Mandatory

- Fungsi Pendidikan (minimal 20% dari Belanja Daerah)
- Fungsi Kesehatan (minimal 10% dari Belanja Daerah diluar Belanja Gaji)
- Infrastruktur Pelayanan Publik (minimal 40% secara bertahap 5 tahun)
- Fungsi Pengawasan
- Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Daerah

Analisis Kelayakan Investasi

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam bidang Analisis Kelayakan Investasi untuk mendukung salah satu tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diperlukan upaya peningkatan kompetensi pegawai yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan special mission Kementerian Keuangan. Saat ini Laporan Analisis Potensi Investasi Daerah (APID) merupakan salah satu output Kanwil DJPb yang disampaikan ke Kantor Pusat dan menjadi informasi dan bahan pertimbangan Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam pengelolaan dana investasi. Peluang investasi daerah yang disajikan dalam laporan yang baik dan lengkap serta analisis yang cukup juga akan membantu daerah untuk mendapatkan investor yang pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi daerah. Kanwil DJPb memiliki Panduan Metodologi Penyusunan Analisis Peluang Ivestasi Daerah dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang disampaikan dengan ND-1121/PB.4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Peluang Investasi Daerah. Selain Pedoman tersebut dipandang perlu juga tambahan wawasan pejabat/pegawai Kanwil DJPb untuk dapat memperkaya aspek dari analisis yang disusun. Atas hal tersebut, perlu penambahan ilmu dari pihak yang berkompeten di bidang investasi. Salah satu yang dipandang pihak yang berkompeten adalah akademisi dari perguruan tinggi di bidang ekonomi khususnya investasi.

PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Jambi tahun 2022 dan 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian. Terdapat 2 Bentuk Investasi Daerah berdasarkan Permen Nomor 12 Tahun 2012 yaitu (1) Investasi Surat Berharga/pembelian saham atau pembelian surat utang dan (2) Investasi Langsung/penyertaan modal atau pemberian pinjaman.

Koordinasi Penyaluran TKDD di Pemda Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah DJPb menyelenggarakan fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Transfer ke Daerah hadir untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih merata. Transfer ke Daerah memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah, mengurangi ketimpangan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan meningkatkan akses layanan publik.

Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, serta Direktur Jenderal Perbendaharaan mengharapkan agar DJPb tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan yang tradisional, namun juga dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist, sekaligus Financial Advisor. Peran DJPb dimaksud telah dilembagakan pada instansi vertikal DJPb melalui implementasi shadow organization sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-2/PB/2023 dan Nomor KEP-3/PB/2023 sejak Januari 2023. Pengembangan tugas dan fungsi KPPN yang berfokus pada advisory pengelolaan anggaran daerah antara lain adalah Pengelolaan APBD. Dalam periode 29 Mei 2024 hingga 5 Juni 2024 Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi penyaluran TKDD pada Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan koordinasi bersama Pemerintah Kota Jambi dilaksanakan secara luring pada hari Rabu, 29 Mei 2024 di Kantor BPKAD Kota Jambi. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Asyep Syaefudin dengan memaparkan tujuan kegiatan ini adalah untuk berkoordinasi dan membahas mengenai Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi, serta beberapa evaluasi terkait penyaluran Transfer ke Daerah.

Nota Kesepakatan sedang berproses dalam pembahasan oleh para kepala bidang BPKAD Kota Jambi dan akan segera diselesaikan. Penyaluran TKD di Kota Jambi telah berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan beberapa hal diantaranya penyaluran DAK Fisik yang batas akhir penyampaian dokumen yaitu 22 Juli 2024. Kegiatan Koordinasi dan Pembahasan Nota Kesepakatan ini merupakan wujud sinergitas kerjasama/kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk membangun keselarasan pengelolaan keuangan negara di daerah serta salah satu pelaksanaan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist

Pada tanggal 5 Juni 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama KPPN sungai penuh mengadakan kegiatan FGD Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan di KPPN Sungai Penuh. Acara dipandu oleh Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Sdr. Lusi Winanda Restu, yang bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam kegiatan FGD tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang PPA II, Sdr. Asyep Syaefudin, yang sekaligus menjadi narasumber dengan menyampaikan materi terkait Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci per 31 Mei 2024. Diperoleh informasi masih terdapat 9 desa yang belum salur Dana Desa Tahap I, dan belum terdapat realisasi DAK Fisik. Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Sungai Penuh telah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemda tersebut dengan melakukan mediasi dengan pihak terkait guna mencari alternatif solusi agar Dana Desa tahap I bisa disalurkan tepat waktu dan segera melakukan proses perekaman kontrak DAK Fisik mengingat batas waktu semakin dekat.



Pembinaan dan Supervisi KPPN Kuala Tungkal, Bangko dan Jambi

Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas KPPN Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-1/PB/2023 hal Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas KPPN Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja layanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat berdasarkan indikator komponen treasury, pengelola fiskal, representasi kemenkeu di daerah, dan special mission, financial advisor, dan tata kelola internal yang diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam melaksanakan pembinaan dan supervisi tersebut terdapat ketentuan berkaitan dengan pemenuhan dokumen pendukung penguatan dan pengembangan peran KPPN sesuai dengan Standardisasi Manajemen KPPN sebagai bagian dari komponen LHPS Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap semester sesuai dengan ND- 3173/PB.1/2022 tanggal 8 September 2022 hal Standardisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS).

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan supervisi tersebut perlu dibuat suatu program kerja yang dibuat setiap satu semester sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan supervisi KPPN.

Pembinaan dan supervisi dilaksanakan di KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi pada bulan April, Mei, dan Juni 2024 untuk periode semester I tahun 2023 dengan metode on desk reviu dan on the spot ke KPPN.



Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Kuala Tungkal, KPPN Bangko, dan KPPN Jambi menggunakan metode on the spot dimana Tim Pembina dan Supervisi mengunjungi KPPN secara langsung. Tim Pembina dan Supervisi mengunjungi KPPN Kuala Tungkal pada tanggal 13 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024, KPPN Bangko pada tanggal 27 Mei 2024 s.d. 31 Mei 2024, dan KPPN Jambi pada tanggal 4 Juni 2024 s.d. 7 Juni 2024.

Dalam pembinaan pada masing-masing KPPN, Tim Supervisi dan Pembinaan memulai kegiatan dengan mengadakan entry meeting pembinaan bersama KPPN terkait. Pada Entry Meeting Tim menyampaikan maksud dan tujuan dari pembinaan. Pada saat pelaksanaan, Tim menggunakan metode pengecekan dokumen (sampel maupun populasi), wawancara, dan observasi untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan faktual terhadap pelaksanaan proses bisnis pada KPPN terkait. Pembinaan dan Supervisi ditutup dengan closing meeting, dimana Tim Pembinaan dan Supervisi memaparkan hasil pengamatan, memberikan feedback, dan berdiskusi dengan KPPN terkait temuan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, secara garis besar KPPN Kuala Tungkal, KPPN Bangko, dan KPPN Jambi telah menjalankan Proses Bisnis secara baik dan sesuai prosedur.

DODOL DAN TEH ROSELLA ADSARI



UMKM DODOL DAN TEH ROSELLA ADSARI

atau yang lebih dikenal dengan UMKM Adsari merupakan UMKM yang juga bergerak di bidang kuliner dalam bentuk teh dan dodol. UMKM ini berlokasi di Komplek Pinang Merah, Kelurahan Bagan pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Produk utama dari UMKM Adsari adalah Teh Rosella. Sesuai dengan namanya produk teh ini berasal dari sari bunga rosella. Bunga rosella memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun karena keterbatasan bahan baku yang harus menunggu produksi bunga rosella, UMKM Adsari memproduksi produk lain yaitu Dodol Adsari.

Pemilik UMKM ini bernama Busra Hanem yang melakukan produksi teh dan dodol secara rumahan. Keterbatasan sumber daya tenaga kerja, sehingga pembuatan teh dan dodol hanya dilakukan oleh pemilik UMKM beserta keluarga. UMKM ini sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan berkembang sampai dengan sekarang. Sempat mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat dampak Covid 19 mengakibatkan pemasaran produk yang awalnya sudah menggunakan platform shopee harus terhenti sementara. Sehingga, UMKM Adsari hanya memasarkan produknya secara offline yaitu whatsapp.

Meskipun demikian, produk UMKM Adsari sudah tergabung dalam Asosiasi Makanan dan Minuman (Asmami) Kota Jambi dan memiliki beberapa izin legalitas usaha seperti NPWP, NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal. Produk teh rosella dijual dengan dua kemasan yaitu kemasan kecil seharga Rp6.000 dan kemasan besar seharga Rp22.000.

UMKM BINAAN

KANWIL DJPb & KPPN PROVINSI JAMBI





PASAR BUAH

Pasar Buah yang sudah berdiri sejak tahun 70an ini masih berdiri hingga sekarang di kawasan Pasar Kota Jambi



DASAR HUKUM

Berdasarkan ND-1700/PB.1/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Kewajiban Deklarasi Data Pegawai Dalam Rangka Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Ditjen Perbendaharaan. Seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan (CPNS, PNS, PPPK, pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, dan pejabat/pegawai yang ditugaskan di unit non eselon/Badan Layanan Umum) wajib membuat Deklarasi Data Pegawai (DDP) dengan batas waktu sampai dengan 30 Juni 2024.

PENGERTIAN

Deklarasi Data Pegawai merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses implementasi KMK 475 Tahun 2023, sehingga kami mengharapkan sinergi pimpinan unit kerja untuk memastikan seluruh pegawai di unit masing-masing telah melakukan pengisian DDP dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



PELAKSANAAN DI KANWIL DJPb PROVINSI JAMBI



Berdasarkan ND-124/WPB.065/2024 tanggal 03 Juni 2024 hal Bimbingan Teknis Pengisian Deklarasi Data Pegawai Dalam Rangka Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan. Acara tersebut dibawakan oleh Bapak Fedrioka Kasmar selaku Kepala Bidang SKKI dan Bapak Harada selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dengan teknis pelaksanaan acara melakukan praktek langsung pengisian data deklarasi pegawai pada aplikasi satu kemenkeu dan HRIS. Dengan dilaksanakannya bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat memenuhi kewajiban deklarasi data pegawai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.



MENGENAL :

KPPN SUNGAI PENUH

Kabupaten Kerinci adalah kabupaten paling barat di provinsi Jambi. Awalnya Kerinci adalah nama sebuah gunung dan danau (tasik), tetapi kemudian wilayah yang berada di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Dengan begitu daerahnya disebut sebagai Kerinci (Kinci atau Kince atau "Kincai" dalam bahasa setempat), dan penduduknya pun disebut sebagai orang Kerinci. Melalui UU No 61 tahun 1958, pada tahun 1958 Kerinci ditetapkan menjadi satu kabupaten yang berdiri sendiri, dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi. Sejak 2011, kabupaten ini beribu kota di Siulak. Sebelumnya pusat pemerintahan terletak di Sungai Penuh, yang saat ini berstatus sebagai kota.

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kotamadya terbesar kedua yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.

Sumber: Buku Profil KPPN Sungai Penuh

KPPN Sungai Penuh berdiri pada tahun 1974 dan terlahir dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 April 1975 Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, kantor tersebut berubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) hingga pertengahan tahun 1990. Pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor 645/ KMK/01/1989, kantor tersebut berubah menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang merupakan penggabungan antara Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, walaupun tidak secara gamblang dicantumkan perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tetapi secara tegas tidak ada lagi nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Selanjutnya, yang ada adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



PSAP 17 : PROPERTI INVESTASI

Latar belakang adanya PSAP 17 tentang Properti Investasi didasari pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas persiapan Pemerintah Pusat untuk mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Tahun 2015 nomor 110/LHP/XV/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang memuat rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar melakukan identifikasi atas informasi akrual dan kebutuhan akan standar secara menyeluruh serta berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam rangka menetapkan implementasinya.

PSAP 17 ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait, diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Contoh properti investasi yaitu tanah yang dikuasai dengan tujuan kenaikan nilai, tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan, bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas & disewakan kepada pihak lain, bangunan yang belum terpakai dan untuk disewakan kepada pihak lain, dan bangunan infrastruktur yang disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diakui jika dan hanya jika biaya perolehan dapat diukur dengan andal dan manfaat ekonomi mengalir ke entitas. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Ketika suatu properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen ataupun tidak memiliki manfaat ekonomi, maka akan dilakukan pelepasan dimana imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi akan diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 tentang Properti Investasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

Investasi Pemerintah



HANUM NATA DE COCO

UMKM Hanum Nata De Coco merupakan UMKM yang bergerak di bidang olahan minuman. Berdasarkan profiling UMKM yang telah dilakukan, UMKM ini menjadi salah satu binaan UMKM dari Kanwil DJPb Jambi. Telah beroperasi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pengolahan nata de coco dilakukan rumahan yang berlokasi di Jl. Pattimura 2 No.2, Rt.14, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

UMKM Nata de Coco mulai terjun berjualan melalui instagram sejak tahun 2019 dan terus aktif sampai dengan sekarang. Pengemasan produk sudah berkembang dan telah dilengkapi dengan label produk. Memiliki keunggulan dengan tidak menggunakan pengawet, menambah nilai bagi produk ini.



Pemilik UMKM sudah sering mengikuti kegiatan pemasaran produk seperti bazar dan kegiatan lainnya. Produk UMKM ini sudah memiliki legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat halal.

Selain menjual olahan murni nata de coco, pemilik UMKM juga mengembangkan olahan nata de coco menjadi minuman berasa dengan merek Nata Drink.



CONTACT US



@hanumnatadecoco



0811-7417-417

UMKM BINAAN

KANWIL DJPb & KPPN PROVINSI JAMBI

CINTAI NEGERI MU,
BELI PRODUK UMKM!

Manfaat Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia

Pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting dalam kemajuan ekonomi dan sosial suatu daerah. Di Indonesia, pembiayaan infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) telah menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. KPBU bukan hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga menghadirkan berbagai manfaat bagi pembangunan di daerah otonom. Tulisan ini akan membahas manfaat pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dengan mengacu pada berbagai penelitian dan studi kasus yang ada di Indonesia.

1. Mengatasi Keterbatasan Sumber Dana Pemerintah

Keterbatasan anggaran pemerintah seringkali menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur. Pendanaan pemerintah umumnya bersumber dari pajak, retribusi, penerimaan bukan pajak, hibah, dan pinjaman. Namun, sumber-sumber ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut Maman Suhendra (2017), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 4.796,2 triliun pada periode 2015–2019, sementara kemampuan pendanaan dari APBN/APBD hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Dalam konteks ini, KPBU menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dengan melibatkan sektor swasta dalam proyek infrastruktur.



2. Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Proyek

Skema KPBU menawarkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur karena melibatkan sektor swasta yang memiliki pengalaman, keahlian, dan modal. Dengan adanya KPBU, proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien, serta dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Casnoto (2018), skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang berkualitas, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini juga mengurangi beban pemerintah dalam hal operasional dan pemeliharaan infrastruktur.

3. Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu manfaat signifikan dari KPBU adalah transfer pengetahuan dan teknologi dari sektor swasta ke pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek KPBU, sektor swasta yang berpengalaman akan berbagi pengetahuan dan teknologi terkini dengan pemerintah daerah. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memelihara infrastruktur. Manfaat ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup manajemen proyek dan administrasi yang lebih profesional.



4. Pembagian Risiko

Dalam skema KPBU, risiko proyek dibagi antara pemerintah dan pihak swasta. Risiko yang dihadapi pemerintah antara lain risiko politik, risiko hukum, dan risiko pengadaan tanah, sedangkan risiko desain dan konstruksi ditanggung oleh swasta. Pembagian risiko ini membuat proyek infrastruktur menjadi lebih aman dan dapat diandalkan. Menurut penelitian Palupie dan Yuniarto (2016), risiko utama dalam proyek infrastruktur KPBU yang ditanggung bersama meliputi risiko finansial, risiko force majeure, risiko lingkungan, dan risiko kegagalan proyek. Dengan berkurangnya risiko yang harus ditanggung pemerintah secara langsung, proyek infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien.

7. Contoh Implementasi

Di Indonesia, beberapa proyek infrastruktur telah berhasil dilaksanakan melalui skema KPBU. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan jalan tol dan bandara yang melibatkan sektor swasta dalam pembiayaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema KPBU dapat diterapkan dengan sukses untuk proyek-proyek skala besar dan diharapkan berjalan dengan baik pada proyek yang berskala kecil. Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu dimitigasi dengan tepat seperti keterbatasan sumber daya dan regulasi yang sekiranya perlu disesuaikan guna mengakselerasi skema KPBU pada proyek pemerintah.



KESIMPULAN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia memberikan banyak manfaat, terutama bagi daerah otonom yang menghadapi keterbatasan dana. Skema ini tidak hanya mengatasi keterbatasan anggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi proyek, transfer pengetahuan, pembagian risiko, dan partisipasi dunia usaha. Dengan infrastruktur yang memadai, daerah otonom dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, KPBU merupakan solusi strategis yang perlu terus dikembangkan dan didukung oleh berbagai pihak terkait.

GUNUNG KERINCI & KEBUN TEH KAYU ARO

Letusan Gunung Kerinci memberi berkah bagi tanah di kaki-kakinya. Teh menjadi salah satu hasil perkebunan di sini. Perkebunan Teh Kayu Aro merupakan peninggalan Belanda dan menjadi kebun teh pertama dan tertua di Indonesia. Untuk yang ingin menghirup udara segar, wisata ke sini menjadi pilihan yang tepat.

Memiliki ketinggian 3.805 Mdpl, Gunung Kerinci menjadi Gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan salah satu dari seven summit of Indonesia.

AIR TERJUN BERASAP

Berlokasi di Desa Telun Berasap, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Airt Terjun Berasap menjadi salah satu objek wisata alam yang indah, dikelilingi oleh embun dan pepohonan hijau memberikan air terjun ini kesan yang segar dan natural.

UMKM BINAAN

KANWIL DJPb & KPPN PROVINSI JAMBI

UMKM Ratu Djamoë merupakan salah satu UMKM binaan oleh KPPN Jambi yang bergerak di bidang olahan minuman. UMKM ini sudah dibina oleh KPPN sejak tahun 2022. Sehingga, UMKM ini sudah sering mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh Kanwil maupun KPPN.

Produk awal sebelum memproduksi jamu adalah madu dengan brand Ratu Madoe. Kemudian produk berkembang dan bertambah menjadi Ratu Djamoë. Produk jamu yang dihasilkan adalah jamu tradisional berupa jamu kunyit asam, jamu kunyit sirih majakani, jahe merah, dan lainnya. Produk dikemas dengan botol 250 ml dan diberikan label nama produk beserta kontak whatsapp dan instagram.

Pemasaran produk telah dilakukan melalui metode online seperti instagram, whatsapp, dan platform grab maupun maxim. Produk UMKM Ratu Djamoë juga sudah memiliki legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat halal. Harga satuan jamu sebesar Rp10.000/pcs.



RATU DJAMOE

CONTACT US



RATUDJAMOE_OFFICIAL



0822-1388-3677



RATU DJAMOE

SEMUA LAYANAN KANWIL

Rp O

DJPB PROVINSI JAMBI

SALURAN PENGADUAN

SMS



0852-8266-0367 | s.id/Pengaduan06



kanwiljambi.pengaduan@gmail.com



djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi



pengaduandjpb.kemenkeu.go.id



wise.kemenkeu.go.id



TIM REDAKSI

SIPIN - Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi



KANWIL
DITJEN

PERBENDAHARAAN

Provinsi
JAMBI

Pengarah

Burhani AS

Ketua Tim Redaksi

Ahmar Rudi

Penyunting

Dito Mahar Putro

Tim Redaksi

**Leonard Rizal Tamba, M. Ichwan Erfit, Elsa Yuliana, Elsa Nurva
Novita, Maisya Hanifah S., M. Aman Saputra**

Desain dan Layout

Amdi Noviwijaya, Allyza Nur Amalia, Raudya Tuzzahra



Volume II 2024

SIPIN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi